

Alienasi Pemuda dalam Politik: Peran Nilai dan Kepercayaan Politik Pada Partisipasi Politik Pemilih Pemuda

Rabiatul Munawarah¹, Andreas Agung Kristanto²

^{1,2} Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Article Info

Article history:

Received 17/01/2022

Revised 01/02/2022

Accepted 20/02/2022

Keywords:

political participation;

personal values;

political trust;

young voters.

ABSTRACT

Youth's awareness of the social phenomenon in society makes their political perspective as important as a matter of concern in each upcoming campaign period. Their values and judgments tend to lead them into certain actions or attitudes while participating in terms of politics. In order to understand this matter, this study is aimed to examine the correlation between personal values, political trust, and young voter's political participation. The research has been conducted through a quantitative approach using a political participation scale, personal value scale, and political trust scale. Researcher used accidental sampling technique to retrieve 102 young voters who have been legally registered due to regional law as a sample of respondents. Then, the obtained data were analyzed using Somer's Delta test. The result of Somers'd analysis have been shown that there is a correlation between personal values and political participation ($r = 0,399$ and $p = 0,000$; $p < 0,05$) and there is a correlation between political trust and political participation ($r = 0,180$ and $p = 0,047$; $p < 0,05$).

ABSTRAK

Kesadaran pemuda yang tinggi terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi di masyarakat membuat pandangan mereka terhadap politik menjadi hal yang turut diperhatikan di setiap periode kampanye mendatang. Nilai-nilai dan penilaian mereka cenderung mengarahkan kepada tindakan atau sikap tertentu dalam partisipasi politik. Sehingga, untuk memahami fenomena tersebut akan diteliti hubungan antara nilai personal dan kepercayaan politik dengan partisipasi politik pemilih pemuda di kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap derajat keeratan hubungan antara nilai personal dan kepercayaan politik dengan partisipasi politik. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan skala partisipasi politik, skala nilai personal, dan skala kepercayaan politik. Penelitian menggunakan teknik *accidental sampling* dalam metode penarikan sampel. Kemudian, data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji Somer's Delta. Sampel penelitian adalah 102 orang pemilih pemuda yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap di kota Samarinda. Hasil analisis uji Somers'd menunjukkan bahwa ada hubungan antara nilai personal dengan partisipasi politik yaitu diperoleh nilai $r = 0,399$ dan $p = 0,000$ ($p < 0,05$). Kemudian, ada hubungan antara kepercayaan politik dengan partisipasi politik yaitu diperoleh nilai $r = 0,180$ dan $p = 0,047$ ($p < 0,05$).

Kata kunci

partisipasi politik;
nilai personal;
kepercayaan politik;
pemilih pemuda.

Corresponding Author :

Rabiatul Munawarah

Program Studi Psikologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Mulawarman

Email: rabiatul.mnwrh@gmail.com

LATAR BELAKANG

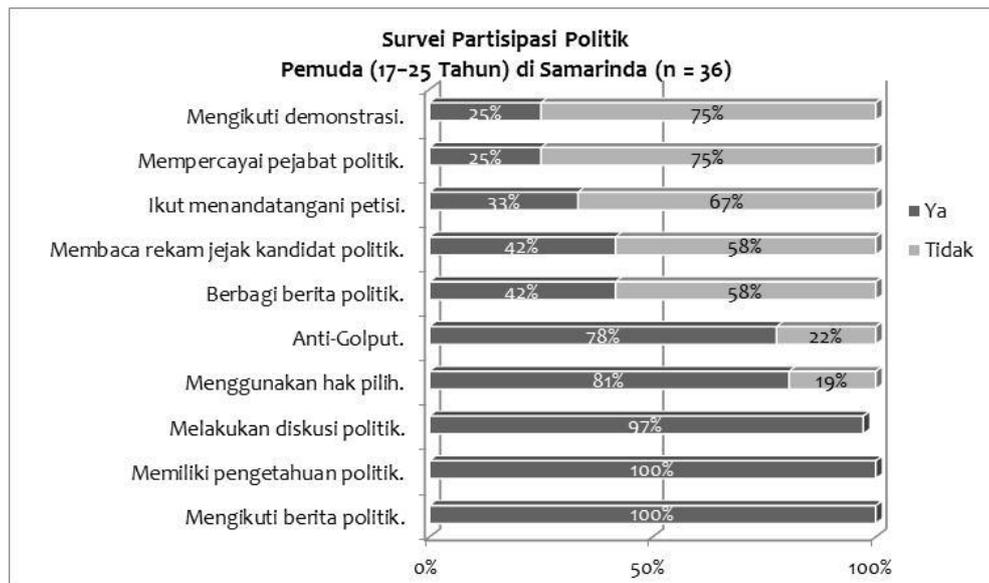
Peran pemuda terus menguat dari peradaban ke peradaban di setiap momentum sejarah Indonesia. Sebagai garda terdepan dari perubahan, kaum muda selalu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (2019) pada tahun 2018 diperkirakan jumlah penduduk produktif Indonesia mencapai angka 179 juta atau sebesar 68% dari keseluruhan populasi. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa dua pertiga dari penduduk Indonesia akan didominasi oleh penduduk berusia muda dengan potensi besar dalam sektor pertumbuhan dan pembangunan bangsa. Perihal tahun 2018 menjadi permulaan Indonesia menapaki bonus demografi, maka tahun-tahun politik pun akan melibatkan banyak pemilih muda atau pemilih pemula dalam proses demokrasi yang berlangsung (BPS, 2013).

Faktor usia yang relatif belia dapat menyebabkan para pemuda cenderung bersikap antipati terhadap politik. Para generasi muda sama sekali pasif dalam aksi-aksi sipil, skeptis terhadap berbagai lembaga politik dan pemerintahan, serta tidak berminat pada proses politik dan persoalan politik. Bagi mereka memerhatikan isu sosial dan menjadi masyarakat yang baik dengan saling membantu merupakan tindakan yang lebih penting daripada memberikan hak suara (Haste & Hogan, 2006). Partisipasi

mereka diperhitungkan dan peran mereka sangat substansial sebab angka demografi mereka yang tinggi. Mereka menjadi salah satu penyumbang suara terbanyak dalam politik dan dapat memberikan efek yang signifikan dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Menurut Burns dkk (2001) partisipasi politik adalah kegiatan yang bertujuan untuk memengaruhi tindakan pemerintah baik secara langsung dengan cara memengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik atau secara tidak langsung dengan cara memengaruhi seleksi pejabat yang akan membuat kebijakan tersebut. Partisipasi politik didefinisikan sebagai istilah yang mengacu pada kekuatan warga negara atau aktivitas masyarakat yang bertujuan untuk memengaruhi atau mengubah struktur kekuatan yang ada dalam ranah politik. Tidak ada garis demarkasi yang jelas mengenai tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik. Selama suatu tindakan masyarakat memberikan dampak terhadap perubahan kekuatan secara politis, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi politik. Sehingga, partisipasi politik bisa menjadi hampir segalanya.

Fenomena partisipasi politik di kalangan pemuda dilengkapi dengan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti secara acak pada anak-anak muda di Samarinda. Adapun hasil survei yang didapatkan sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil Survei Awal Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Samarinda

Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa secara rata-rata sebesar 62% pemuda cukup terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik. Namun, pemuda menunjukkan respons yang rendah untuk kegiatan seperti ikut serta dalam aksi demonstrasi, menganggap politisi saat ini sudah mewakili kepentingan masyarakat, ikut menandatangani petisi mengenai politik, mengetahui tentang rekam jejak calon yang akan dipilih dalam pemilu, dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan politik di media sosial.

Sebagaimana gambaran yang didapatkan melalui data survei tersebut, sebagian besar anak muda mengetahui kewenangan dirinya terhadap hak suara yang dimiliki, serta adanya minat yang ditujukan dalam diskusi maupun berita politik.

Namun, kurangnya pembudayaan atau keselarasan dengan sistem sosial dapat menyebabkan pemuda untuk cenderung memisahkan antara kehidupan sosial dengan masalah politik. Konsekuensi dari hal tersebut adalah mereka mudah untuk merasa tidak puas, tidak mempercayai, ataupun menunjukkan sikap yang bermusuhan dengan institusi politik dan pemerintah (Cheung, 2011).

Beberapa penelitian dalam ranah politik mungkin mengabaikan efek dari perubahan yang mendalam pada perilaku individu selama pergolakan zaman. Pola dari perilaku politik, implikasi politik secara hierarki, baik itu teori maupun bukti empiris telah banyak diteliti melalui penerapan psikologi dalam bidang politik. Teori psikologi meyakini bahwa perilaku merupakan hasil interaksi dari organisme dan lingkungan, termasuk perilaku dalam politik. Individu dikatakan memiliki pemikiran politik apabila pengetahuan yang dimiliki bukan sekadar pengetahuan mengenai teori, namun pemahaman akan pengetahuan bahwa mereka adalah partisipan dalam sebuah proses politik (Surbakti, 2010).

Seiring diperhitungkannya posisi pemuda sebagai seorang peserta pemilu, maka faktor yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi mereka pun turut diperhatikan, salah satunya adalah menyoroti nilai dan sikap dalam memahami budaya politik individu.

Menurut Schwartz (2006) pada keterlibatan masyarakat di dalam ranah politik terdapat tingkah laku tertentu yang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi

yang dianut masyarakat sebagai mahluk individu.

Ada sebuah pendekatan potensial yang dapat menilai masalah sikap individu dalam organisasi, namun hal tersebut belum banyak mendapatkan perhatian, yaitu pendekatan berdasarkan nilai konstruk. Sebagian besar ahli berpendapat bahwa nilai berperan sebagai penyelenggara dalam evaluasi politik (Feldman, 2013).

Menurut Feldman (2013) nilai didefinisikan sebagai gagasan fundamental tentang pengaturan yang menyusun kehidupan masyarakat. Nilai merupakan cerminan kepentingan sosial yang bertransformasi menjadi gagasan tentang kondisi sosial yang diinginkan dan memberikan validitas kepada kepentingan individu di antara kepentingan masyarakat secara kolektif.

Berdasarkan penelitian Schwartz (2006) diketahui bahwa nilai politik tertentu mengekspresikan nilai personal dasar dalam ranah politik. Sejumlah hipotesis diuji untuk menentukan sejauhmana struktur motivasi membatasi nilai dasar dan memberikan koherensi pada nilai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dasar mampu menjelaskan perbedaan substansi pada tiap nilai politik individu dan mampu memprediksi sikap pemilih secara signifikan.

Menurut Pacheco dan Owen (2013) peran nilai pada diri individu turut memengaruhi kecenderungan partisipasi politiknya. Individu yang memiliki pemikiran yang terbuka, transendental, dan fleksibel terhadap perubahan cenderung terlibat secara aktif dalam partisipasi politik. Kemudian, diketahui bahwa individu juga dapat menjadikan politik sebagai sarana untuk mencapai kepentingan nilai pribadi (Hakim & Soetjipto, 2014). Dengan demikian, nilai dapat menjadi sebuah dorongan ketidaksadaran dalam mengekspresikan tindakan politik.

Oleh sebab itu, kemampuan nilai personal dalam memprediksi pilihan politik

memunculkan asumsi bahwa individu yang tidak termotivasi untuk memilih, meyakini bahwa tidak ada satupun kecocokan antara nilai personalnya dengan para calon kandidat politik (Caprara dkk, 2006).

Faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang kurang berpartisipasi dalam proses politik ada dua hal, yaitu kurangnya kesadaran dan kepercayaan politik. Selain itu, pengetahuan yang dangkal turut menjadi sebab adanya sikap tidak peduli (Surbakti, 2010). Menurut Mangum (dalam Ramadhanil dkk, 2015) faktor yang memengaruhi keterlibatan psikologis seseorang dalam politik terdiri dari tiga komponen, yaitu kepercayaan politik, efikasi politik, dan keterikatan politik. Keterkaitan ini ditinjau melalui perspektif sosial yang berpendapat bahwa individu akan bertindak berdasarkan informasi politik yang mereka terima (adanya proses penilaian), dan rasa percaya inilah yang mengarahkan seseorang kepada tindakan untuk berpartisipasi dalam politik (Saad & Salman, 2013).

Menurut Uslaner (2018) kepercayaan politik adalah keyakinan masyarakat terhadap institusi politik, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, ataupun kepolisian untuk bertindak sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Keberadaan rasa percaya dari masyarakat memiliki peran yang penting, sebab kepercayaan tersebut menjadi esensi yang menopang dan mendukung legitimasi sistem politik yang telah dibangun oleh pemerintah. Sehingga, ketika rasa percaya masyarakat tidak terbentuk dengan baik maka akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap pengelolaan dan pemberdayaan negara (Haryanto dkk, 2015).

Terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap politik dan para pelakunya dapat disebabkan karena masyarakat tidak terdidik dengan budaya politik yang sehat. Adanya politik uang, elektabilitas kandidat yang tidak mumpuni, dan membenarkan segala cara demi

mengejar kekuasaan, telah menggoyahkan harapan masyarakat terhadap politik yang bersih dan pemerintah yang terpercaya. Proses penilaian individu membentuk dasar persepsi yang dapat menjadi pemicu turunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap elit politik.

Sedangkan, kepercayaan politik dapat menguatkan partisipasi politik individu serta menjadi variabel penengah dari rasa kepuasan terhadap demokrasi (Wahyudi dkk, 2013). Individu dengan kepercayaan politik yang tinggi cenderung bersedia menerima risiko atas pilihan yang diharapkan dari proses politik. Sehingga, kepercayaan berperan sebagai variabel yang mendorong kesiapan individu untuk menghadapi setiap risiko dari partisipasi politik. Kepercayaan politik menjadi sumber kunci dari kestabilan dan justifikasi masyarakat terhadap kewenangan dari sistem politik yang berlaku (Haryanto dkk, 2015).

Secara teoretis generasi muda lebih toleran terhadap keragaman, sehingga memiliki internalisasi yang lebih kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi (Catterberg & Moreno, 2005). Idealnya hal tersebut dapat meningkatkan kesediaan mereka untuk mendukung lembaga-lembaga demokratis. Namun, pada saat yang sama peningkatan taraf pendidikan justru berkaitan dengan peningkatan kompetensi kognitif yang menumbuhkan sikap kritis terhadap sistem politik dan keterasingan generasi muda dari partai politik. Dengan demikian, faktor nilai personal dan kepercayaan politik yang memiliki keterlibatan dalam partisipasi politik individu, menjadi sebuah hipotesis yang menarik untuk diteliti lebih jauh.

Berdasarkan rangkaian permasalahan yang diuraikan di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian untuk menjawab beberapa masalah yang telah dirumuskan, sebagai berikut: pertama, untuk mengetahui hubungan antara nilai personal dengan

partisipasi politik pemilih pemula di Samarinda. Kedua, untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan politik dengan partisipasi politik pemilih pemula di Samarinda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk mencari keterangan dari objek yang sedang diteliti. Kemudian, penelitian menekankan pada fenomena-fenomena objektif yang dimaksimalisasi melalui angka-angka dan pengolahan statistik (Siyoto & Sodik, 2015). Penelitian kuantitatif menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Kemudian, hubungan diantara variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif (Sujarweni, 2020).

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti menggunakan rancangan penelitian deskriptif dan korelasional. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel. Kemudian, penelitian korelasional yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengukur derajat keeratan di antara variabel penelitian (Sujarweni, 2020).

Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah 102 orang pemilih pemula yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap di kota Samarinda. Penarikan sampel dilakukan melalui metode *accidental sampling* yaitu pengambilan sampel atau responden berdasarkan momentum. Setiap individu yang ditemui secara kebetulan oleh peneliti dan dianggap memenuhi kriteria untuk menjadi sumber data, maka akan dijadikan

sebagai sampel dalam penelitian ini (Sujarweni, 2020). Secara spesifik, yaitu individu yang merasa memenuhi kriteria sampel dan bersedia mengisi formulir *online* dari peneliti.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan alat pengukuran instrumen psikologi. Alat pengukuran atau instrumen yang digunakan ada tiga macam, yaitu alat ukur nilai personal, kepercayaan politik, dan partisipasi politik. Alat ukur tersebut dimodifikasi dengan penskalaan model Likert lalu disebarakan melalui formulir *online*.

Skala partisipasi politik terdiri dari 26 aitem dengan koefisien *alpha* sebesar 0,737. Selanjutnya, skala nilai personal terdiri dari 28 aitem dengan koefisien *alpha* sebesar 0,717. Kemudian, skala kepercayaan politik terdiri dari 23 aitem dengan koefisien *alpha* sebesar 0,745.

Teknik Analisis Data

Data penelitian yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji Somer's

Delta melalui bantuan program SPSS (*Statistical Packages for Social Science*) versi 25.0 for windows. Uji Somers merupakan salah satu uji nonparametrik yang digunakan untuk mengetahui kekuatan korelasi antara dua variabel dengan penyajian data yang diolah melalui perhitungan tabulasi silang (Nugroho dkk, 2008). Menurut Riduwan dan Akdon (2020) perhitungan uji Somers dapat dilakukan melalui formulasi berikut:

$$\text{Somers } (d_{yx}) = \frac{F_a - F_i}{F_a + F_i + T_y}$$

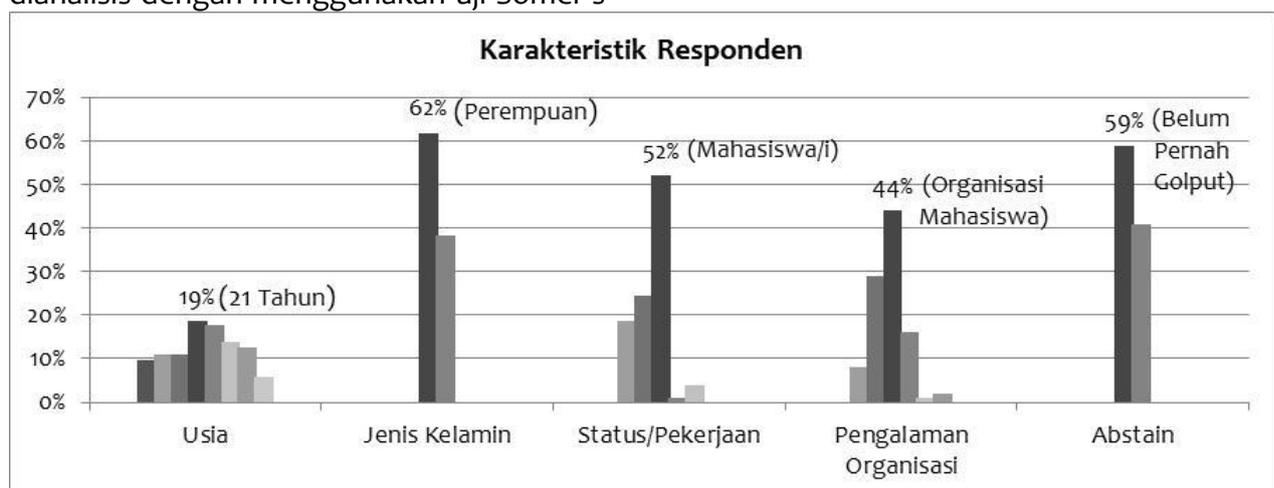
Keterangan:

- F_a = frekuensi pasangan yang searah.
- F_i = frekuensi pasangan yang berlawanan.
- T_y = banyaknya jumlah pasangan kolom.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik responden penelitian pemilih pemula di Samarinda dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Karakteristik Responden Penelitian

Berdasarkan analisis deskripsi pada gambar 2 diketahui bahwa 102 responden penelitian pemilih pemula dengan rentang usia antara 18–25 tahun didominasi oleh

pemilih pemula dengan usia 21 tahun, yaitu sebesar 19 persen. Kemudian, berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh pemilih pemula perempuan, yaitu sebesar 62

persen. Berdasarkan status atau pekerjaan, responden penelitian didominasi oleh pemilih pemula dengan status sebagai mahasiswa, yaitu sebesar 52 persen. Berdasarkan pengalaman organisasi, responden penelitian didominasi oleh pemilih pemula yang pernah bergabung dengan organisasi mahasiswa, yaitu sebesar 44 persen. Lalu berdasarkan pernah atau tidaknya melakukan *abstaining*, responden penelitian didominasi oleh pemilih pemula yang belum pernah memutuskan untuk golput, yaitu sebesar 59 persen.

Hasil Uji Deskriptif

Indikator keadaan kelompok responden pada variabel yang diteliti mengacu pada perbandingan antara skor rerata empirik dan rerata hipotetik. Rerata empirik yang lebih tinggi dari rerata hipotetik merupakan tanda bahwa keadaan kelompok responden termasuk dalam kategori tinggi, demikian juga sebaliknya. Berikut rerata empirik dan rerata hipotetik penelitian:

Tabel 1. Rerata Empirik dan Rerata Hipotetik

Variabel	Rerata Empirik	SD Empirik	Rerata Hipotetik	SD Hipotetik	Status
Partisipasi Politik	66.75	9.04	65	13	Tinggi
Nilai Personal	74.13	6.94	70	14	Tinggi
Kepercayaan Politik	47.61	7.78	57.5	11.5	Rendah

Berdasarkan hasil uji deskriptif pada tabel 1 diketahui bahwa responden penelitian berada pada kategori tingkat

partisipasi politik yang tinggi, adanya tingkat nilai personal yang tinggi, dan tingkat kepercayaan politik yang rendah.



Gambar 3. Sebaran Kategorisasi Skor Responden Penelitian

Berdasarkan analisis sebaran kategorisasi skor pada gambar 3 diketahui bahwa responden penelitian berada pada kategori tingkat partisipasi politik yang sedang, adanya tingkat nilai personal yang sedang, dan tingkat kepercayaan politik yang rendah.

Hasil Uji Asumsi

Uji asumsi yang dilakukan meliputi uji normalitas dan uji linieritas untuk mengetahui kondisi parameter data. Hasil uji normalitas data penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Smirnov	p	Keterangan
Partisipasi Politik	0.104	0.008	Tidak Normal
Nilai Personal	0.233	0.000	Tidak Normal
Kepercayaan Politik	0.106	0.007	Tidak Normal

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Hasil uji normalitas berdasarkan kaidah menunjukkan bahwa sebaran butir-butir partisipasi politik tidak normal ($p = 0,008$; $p < 0,05$).
- 2) Hasil uji normalitas berdasarkan kaidah menunjukkan bahwa sebaran butir-butir nilai personal tidak normal ($p = 0,000$; $p < 0,05$).

- 3) Hasil uji normalitas berdasarkan kaidah menunjukkan bahwa sebaran butir-butir kepercayaan politik tidak normal ($p = 0,007$; $p < 0,05$).

Ketiga variabel penelitian, yaitu partisipasi politik, nilai personal, dan kepercayaan politik memiliki distribusi data yang tidak tersebar secara normal.

Kemudian, hasil uji linieritas data penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Linieritas

Variabel	F _{Hitung}	F _{Tabel}	P	Keterangan
Partisipasi Politik – Nilai Personal	2.066	3.09	0.012	Tidak Linier
Partisipasi Politik – Kepercayaan Politik	2.543	3.09	0.001	Tidak Linier

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Hasil uji linieritas menunjukkan bahwa ada hubungan antara nilai personal dengan partisipasi politik ($F_{hitung} = 2,066 < 3,09$), namun hubungan tersebut tidak linier ($p = 0,012$; $p < 0,05$).
- 2) Hasil uji linieritas menunjukkan bahwa ada hubungan antara kepercayaan politik dengan partisipasi politik ($F_{hitung} = 2,543 <$

$3,09$), namun hubungan tersebut tidak linier ($p = 0,001$; $p < 0,05$).

Jadi, pengujian hipotesis penelitian akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis statistik nonparametrik karena asumsi normalitas dan linieritas data tidak terpenuhi.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji Somers dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Somers

Variabel	Value	Sig.	R
Partisipasi Politik – Nilai Personal	0.399	0.000	15.9%
Partisipasi Politik – Kepercayaan Politik	0.180	0.047	3.2%

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Hasil uji hipotesis antara variabel nilai personal dengan partisipasi politik diperoleh nilai $r = 0,399$ dan $p = 0,000$ (p

$< 0,05$). Sehingga, pengambilan keputusan penelitian yakni H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan

antara nilai personal dengan partisipasi politik.

- 2) Hasil uji hipotesis antara variabel kepercayaan politik dengan partisipasi politik diperoleh nilai $r = 0,180$ dan $p = 0,047$ ($p < 0,05$). Sehingga, pengambilan keputusan penelitian yakni H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kepercayaan politik dengan partisipasi politik.

PEMBAHASAN

Partisipasi Politik dan Nilai Personal Pemilih Pemula

Berdasarkan hasil uji hipotesis Somers yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa nilai personal memiliki hubungan yang signifikan dengan partisipasi politik. Nilai personal memberikan kontribusi sebesar 15,9% terhadap partisipasi politik, sedangkan 84,1% ditentukan oleh faktor lain. Hubungan yang terdapat di antara kedua variabel adalah korelasi positif yang nonlinier. Maknanya adalah hubungan di antara nilai personal dengan partisipasi politik mengalami perubahan ke arah yang sama, namun perubahan hubungan tersebut tidak membentuk suatu grafik garis lurus. Selanjutnya, semakin besar peran nilai personal dalam tindakan politik individu maka semakin tinggi pula dorongan individu untuk berpartisipasi dalam politik.

Menurut Fitriah (2014) nilai personal akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik bila dibersamai dengan efikasi politik internal. Nilai menjadi suatu landasan yang mengarahkan tingkah laku pemilih pemula untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Tingkah laku tersebut dilatarbelakangi oleh gagasan ideologi individu dalam menentukan pilihan politik untuk memilih model pemerintahan yang dirasa paling ideal merepresentasikan nilai personal individu.

Kemudian, individu dengan prioritas nilai tertentu cenderung memiliki peluang berpartisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang memiliki prioritas nilai berbeda. Berdasarkan temuan Pacheco dan Owen (2013) individu dengan pemikiran yang terbuka, transendental, dan fleksibel terhadap perubahan cenderung lebih terlibat secara aktif dalam partisipasi politik bila dibandingkan dengan individu yang memiliki prioritas nilai berbeda.

Secara positif nilai berhubungan dengan partisipasi politik dan menjadi parameter untuk membedakan tindakan pemerintah yang dianggap benar ataupun salah, mengevaluasi kebijakan publik yang dapat diterima, serta sebagai dasar untuk bersikap mendukung ataupun berkompromi dengan keputusan pemerintah (Saad & Salman, 2013).

Masyarakat mungkin saja kehilangan alasan untuk terlibat ataupun memberikan hak suara ketika mereka beranggapan bahwa tindakan mendukung seorang kandidat tidak mampu untuk mengukuhkan dan mewujudkan prioritas nilai mereka. Individu lebih tergugah untuk terlibat saat peluang terwujudnya harapan mereka cukup besar. Program kampanye dan kebijakan yang dapat menawarkan manfaat untuk orang-orang yang merasa kepentingan nilainya turut didukung cenderung akan terlibat secara aktif dan memberikan hak suara secara sukarela. Persepsi bahwa ada kesesuaian nilai antara prioritas nilai masyarakat dengan nilai pemerintah merupakan hal yang krusial dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi (Caprara dkk, 2012). Nilai menjadi keyakinan yang berkaitan erat dengan afeksi. Individu mungkin saja merasa putus asa saat prioritas nilai mereka terancam ataupun bahagia ketika kepentingan nilai tersebut dapat tercapai (Schwartz, 2006).

Menurut Caprara dkk (2012) variabel nilai mampu menjadi faktor prediktor untuk

mengetahui pilihan politik individu bila dikaitkan dengan orientasi politik. Individu yang memprioritaskan keamanan dan kekuasaan mungkin saja mengantisipasi untuk memberikan hak suara kepada partai kubu kanan yang cenderung konservatif dan sejalan dengan kepentingan prioritas nilai tersebut. Begitupun sebaliknya, individu yang memprioritaskan nilai universal mungkin saja mengantisipasi untuk memberikan hak suara kepada partai kubu kiri yang cenderung liberal dan sejalan dengan kepentingan prioritas nilai tersebut. Sehingga, ketika tidak ada kesamaan kepentingan nilai yang ditemukan bagi masyarakat pada kedua pihak, hal tersebut dapat menjadi penentu bagi mereka untuk tetap memberikan hak suara atau memilih untuk golput.

Hasil penelitian ini sejalan pula dengan penelitian Hakim dan Soetjipto (2014) yang menunjukkan temuan bahwa nilai merupakan daya yang menggerakkan individu untuk berpartisipasi. Sebagaimana, partisipasi politik menjadi suatu bentuk pengharapan untuk mewujudkan kepentingan atau keinginan individu. Selain itu, diketahui pula bahwa karakteristik nilai personal individu cenderung memiliki relevansi dengan karakteristik nilai partai politik yang didukung individu tersebut. Misalnya, disimpulkan bahwa para pendukung partai berbasis agama memiliki prioritas nilai religiusitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendukung partai berbasis kebangsaan. Sehingga, semakin spesifik karakteristik dari suatu partai maka nilai personal dari para pendukungnya pun dapat semakin spesifik pula.

Berdasarkan norma kelompok nilai personal pada data penelitian ini diketahui bahwa terdapat 67 orang (65,7 persen) yang memiliki skor nilai personal di atas rata-rata. Hal ini dapat diartikan bahwa 65,7 persen responden pada penelitian menjadikan nilai personal sebagai tolok ukur dalam mempertimbangkan pilihan politik,

menentukan keputusan untuk bersikap mendukung atau menolak kebijakan pemerintah, dan menjadikan tindakan politik sebagai sarana untuk mencapai kepentingan atau tujuan hidup.

Sebesar 22 persen merupakan bagian dimensi transendensi diri dari nilai personal yang menjadikan tindakan politis sebagai sarana untuk mencapai nilai universalisme dan kebajikan. Selanjutnya, sebesar 18 persen merupakan bagian dimensi konservasi dari nilai personal yang menjadikan tindakan politis sebagai sarana memperoleh rasa aman, kesepadanan, dan upaya pelestarian nilai tradisi. Lalu, sebesar 16 persen merupakan bagian dimensi keterbukaan dari nilai personal yang menjadikan tindakan politis sebagai sarana untuk memperoleh hak kebebasan dan kesenangan demi variasi dalam hidup. Kemudian, sebesar 11 persen merupakan bagian dimensi peningkatan diri dari nilai personal yang menjadikan tindakan politis sebagai sarana mewujudkan kepentingan pribadi, mendapatkan kekuasaan, dan memenuhi kebutuhan materiil.

Menurut Cammaerts dkk (2016) bentuk reaksi dan partisipasi pemuda terhadap politik mungkin berbeda setiap waktunya dan menunjukkan perubahan sikap dari waktu ke waktu. Meskipun generasi muda nampak enggan terlibat dalam politik, sebenarnya mereka merupakan generasi yang mampu mengemukakan preferensi dan minat terhadap politik.

Struktur dimensi dari tiap nilai dasar individu mungkin menyebabkan adanya suatu dinamika konflik dan kesesuaian. Tindakan mewujudkan sepuluh nilai dasar yang dimiliki individu memiliki konsekuensi yang dapat menyebabkan konflik dengan motivasi nilai tertentu, namun di saat yang bersamaan sesuai dengan motivasi nilai yang lain. Nilai mungkin berbeda berdasarkan motivasinya, namun mereka tidak berdiri secara terpisah. Dinamika

hubungan antara sepuluh nilai dasar membentuk suatu struktur dimensi dari nilai personal. Mengejar nilai pencapaian dari dimensi peningkatan diri mungkin dianggap bertentangan dengan nilai kebajikan dari dimensi transendensi diri. Hal ini disebabkan karena motivasi nilai pencapaian merupakan tujuan demi keberhasilan pribadi yang sifatnya individualistik, sedangkan nilai kebajikan didasarkan pada kebutuhan individu untuk memperhatikan kesejahteraan orang lain dan mewujudkan kepentingan bersama (Schwartz, 2006). Namun, menurut Hakim dan Soetjipto (2014) dalam budaya di Indonesia mengejar nilai pencapaian pribadi berjalan beriringan dengan mengejar kepentingan nilai kebajikan, sebab pencapaian ambisi individu dianggap belum berhasil jika tidak ada pengakuan sosial dari lingkungan bahwa keberhasilan tersebut turut memberikan manfaat yang luas kepada orang lain.

Oleh sebab itu, dinamika hubungan antara dimensi nilai yang berlawanan menyebabkan adanya suatu urutan prioritas nilai. Tingkatan prioritaslah yang menjadi pembeda pada setiap individu dalam suatu kondisi. Meskipun dinamika hubungan antara dimensi nilai personal memiliki konsekuensi yang berlawanan, tentu saja individu dapat mengejar kesepuluh nilai dasar tersebut melalui tindakan yang berbeda pada waktu yang berbeda dalam situasi yang berbeda (Schwartz, 2006). Walaupun motif dari dimensi konservasi berlawanan dengan motif dari dimensi keterbukaan, serta motif dari dimensi transendensi diri berlawanan dengan motif dari dimensi peningkatan diri, individu menganggap keseluruhan dimensi tersebut sebagai suatu kebutuhan yang diinginkan. Individu akan menginginkan kesuksesan pribadi sekaligus kesejahteraan bersama atau mengharapkan perubahan sekaligus tetap mempertahankan nilai tradisi (Feldman, 2013).

Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa prioritas teratas dari nilai personal responden penelitian adalah transendensi diri. Dimensi transendensi diri merupakan kelompok nilai yang terdiri dari prinsip universalisme dan kebajikan. Hal ini menjadi gambaran bahwa pemuda pada penelitian ini merupakan individu yang memiliki kecenderungan terhadap nilai-nilai kebajikan dan universal. Oleh sebab itu, pemuda dapat cenderung mengidentifikasi kandidat ataupun partai politik dengan karakteristik nilai kebajikan dan universal.

Menurut Hakim dan Soetjipto (2014) pada dasarnya partisipasi politik individu dilandasi oleh kepentingan atau tujuan hidup yang berasal dari keyakinan nilai. Kemudian, upaya untuk mencapai kepentingan nilai tersebut diwujudkan melalui tindakan politis dalam partisipasi politik. Dengan demikian, apabila prioritas nilai transendensi diri pada pemilih pemula pada penelitian ini memiliki keeratan dan korelasi terhadap sikap partisipasi politik mereka, maka dapat disimpulkan bahwa mereka akan cenderung mengidentifikasi pelaku politik yang memiliki relevansi paling erat dengan nilai yang diprioritaskan oleh pemuda, yakni nilai-nilai kebajikan dan universal yang berasal dari dimensi transendensi diri.

Melalui keterkaitannya dengan partisipasi politik, nilai berperan sebagai landasan bagi pemilih pemula yang mengarahkan dirinya untuk berpartisipasi, memprediksi pilihan politik mereka, serta menjadi parameter dalam mengevaluasi tindakan pemerintah.

Partisipasi Politik dan Kepercayaan Politik Pemilih Pemula

Berdasarkan hasil uji hipotesis Somers yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kepercayaan politik memiliki hubungan yang signifikan dengan partisipasi politik. Kepercayaan politik memberikan kontribusi

sebesar 3,2% terhadap partisipasi politik, sedangkan 96,8% ditentukan oleh faktor lain. Hubungan yang terdapat di antara kedua variabel adalah korelasi positif yang nonlinier. Maksudnya adalah hubungan di antara kepercayaan politik dengan partisipasi politik mengalami perubahan ke arah yang sama, namun perubahan hubungan tersebut tidak membentuk suatu grafik garis lurus. Selanjutnya, semakin tinggi taraf kepercayaan individu terhadap politik maka semakin besar pula peluang individu untuk berpartisipasi dalam politik. Kepercayaan politik berperan sebagai bentuk perwujudan dari pengharapan masyarakat terhadap pemerintah (Saad & Salman, 2013; Haryanto dkk, 2015). Untuk membentuk suatu kepercayaan yang mendalam diperlukan waktu yang lama, namun rasa percaya mudah digoyahkan oleh beberapa hal dalam waktu sekejap. Sehingga, untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat memerlukan tindakan yang berhati-hati (Campbell-Cree & Lotten, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Akhrani dkk (2018) yang menunjukkan temuan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kepercayaan politik dengan partisipasi politik. Individu yang memiliki persepsi dan kepercayaan yang baik terhadap politik akan cenderung berpartisipasi dalam pemilu dibandingkan dengan individu yang merasa tidak puas dan kecewa dengan pengalaman politiknya. Kepercayaan politik yang tinggi akan mengarahkan kepada perasaan puas dan pemberian dukungan secara sukarela (Matulesy & Samsul, 2013). Rasa percaya menjadi bagian yang menguatkan ikatan sosial dan mendorong individu untuk mengambil peran dalam mewujudkan modal sosial (Kuncoro, 2018). Kepercayaan politik juga menjadi dasar yang menjaga kestabilan dalam interaksi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Haryanto dkk, 2015).

Masyarakat cenderung hanya mendasarkan penilaian mereka terhadap pejabat atau institusi politik yang paling menonjol di antara perangkat politik lainnya. Penilaian tersebut kemudian disamaratakan terhadap seluruh perangkat lainnya. Sehingga, kepercayaan politik individu terhadap pejabat atau institusi politik biasanya saling tumpang tindih dengan satu sama lain (Kestilä-Kekkonen & Söderlund, 2016).

Menurut Wahyudi dkk (2013) individu dengan kepercayaan politik yang tinggi cenderung bersedia menerima risiko atas konsekuensi yang telah diharapkan dari proses politik. Kepercayaan berperan sebagai variabel yang mendorong kesiapan individu untuk menghadapi setiap risiko yang dapat diperoleh dari partisipasi politik. Kepercayaan dari masyarakat juga menjadi esensi yang menopang dan mendukung legitimasi sistem politik yang telah dibangun oleh pemerintah. Sehingga, ketika rasa percaya masyarakat tidak terbentuk dengan baik maka dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap pengelolaan dan pemberdayaan negara (Haryanto dkk, 2015). Selain itu, kekecewaan masyarakat dapat berimplikasi pada menurunnya rasa percaya terhadap pemerintahan. Dampaknya tidak hanya berhenti sampai disitu, namun terus berlanjut pada munculnya ketidaktertarikan dan pengabaian terhadap urusan politik (Handaningrum & Rini, 2014).

Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 49 persen responden penelitian memiliki tingkat kepercayaan politik yang rendah. Pemuda menilai kandidat politik maupun partai politik memiliki citra negatif yang cenderung melekat. Sehingga, mereka merasa sulit untuk mempersepsikan citra yang berbelaskasih dan penuh kepedulian pada elit politik ketika banyak yang terlibat dalam kasus korupsi. Sentimen demikian menyebabkan pemuda cenderung merasa jenuh terhadap partai politik, sehingga

muncul ketiadaan dorongan ideologis bagi pemuda terhadap keberadaan partai politik maupun institusi politik. Selain itu, hal ini dapat menjadi salah satu kesulitan yang menghalangi pemuda untuk mengembangkan kepercayaan terhadap pemerintah, terutama ketika ada jarak sosial yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan karena rentang usia yang berbeda pula (Tanny & Al-Hossienie, 2019).

Menurut Haryanto dkk (2015) proses penilaian individu membentuk dasar persepsi yang dapat menjadi pemicu turunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap elit politik. Adapun persepsi yang menjadi pemicu dalam menurunkan rasa kepercayaan diantaranya adalah pemerintah dianggap sebagai pihak yang tidak jujur, berwatak koruptor, dan kurang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemuda memandang politik sebagai ranah yang eksklusif, kekakuan sistem dapat membatasi keterjangkauan politik hanya untuk pihak-pihak tertentu saja. Faktor usia yang masih belia membuat responden merasa sebagai generasi muda yang terasing dari dunia politik, selain itu pemuda juga memandang politik hanya sekadar membahas kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu saja. Menurut Alelaimat (2019) adanya perbedaan kepentingan politik dapat menyebabkan keengganan dari anak muda untuk berkontribusi ataupun mendukung kinerja sistem politik yang sedang berlangsung.

Hasil penelitian juga sejalan dengan temuan penelitian Mensana dan Sanjaya (2020) yang menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepercayaan politik dengan partisipasi politik. Penilaian kompetensi menjadi unsur yang paling penting dalam membentuk rasa percaya pemilih pemula terhadap pemerintah. Sehingga, bila kandidat politik dinilai memiliki kompetensi yang baik maka intensi pemuda untuk memberikan hak suara pun akan semakin tinggi. Kemudian

sebaliknya, rasa percaya dari penilaian yang rendah dapat mengakibatkan berkurangnya intensi pemuda untuk memberikan hak suara.

Menurut Matulesy dan Samsul (2013) sistem pemerintahan yang dianggap dapat menerima pengaruh, lebih mudah memunculkan rasa percaya masyarakat terhadap elit politik. Kepercayaan politik menjadi suatu perwujudan dari harapan bahwa pemerintah akan merespons aspirasi masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat menunjukkan ketidakpuasan dan kemarahan apabila harapan tersebut bertentangan dengan realitas. Menurunnya rasa percaya juga dapat memunculkan radikalisme dan krisis sosial pada diri masyarakat.

Melalui keterkaitannya dengan partisipasi politik, kepercayaan politik memiliki fungsi diantaranya sebagai variabel yang dapat mendorong kesiapan individu untuk menerima risiko yang mungkin didapatkan dari partisipasi politik, mendorong pemberian dukungan yang lebih sukarela, menjaga kestabilan dari dinamika interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, dan sebagai bentuk perwujudan harapan bahwa pemerintah akan merespons aspirasi masyarakat.

Partisipasi Politik, Nilai Personal, dan Kepercayaan Politik Pemilih Pemula

Dinamika hubungan di antara ketiga variabel nilai, kepercayaan, dan partisipasi, dapat bersifat resiprokal, ketiga variabel diketahui memiliki peran masing-masing di antara keterkaitan hubungannya.

Melalui keterkaitannya dengan partisipasi politik, diketahui bahwa nilai dapat menjadi dorongan ideologis yang menggerakkan individu untuk berpartisipasi. Sehingga, menurunnya tingkat partisipasi politik dianggap sebagai tidak adanya dorongan ideologi yang dirasakan individu terhadap keberadaan partai politik maupun institusi politik (Handaningrum & Rini, 2014).

Individu mungkin saja kehilangan alasan untuk berpartisipasi, kecuali bila dirinya meyakini bahwa memberikan hak suara berdampak pada perwujudan dari kepentingan nilai yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, adanya kesenjangan nilai dapat memberikan jarak sosial antara masyarakat dengan politik (Caprara dkk, 2012). Pada sisi yang lain, partisipasi politik dapat menjadi sarana yang digunakan individu untuk mewujudkan kepentingan nilai pribadinya (Hakim & Soetjipto, 2014). Sehingga, hubungan diantara keduanya tidak hanya sebatas nilai personal berperan sebagai landasan yang dapat memprediksi tingkah laku individu di dalam politik, tetapi turut terdapat peran timbal balik dari variabel partisipasi politik yang menjadi sarana bagi individu untuk memenuhi kebutuhan dari nilai-nilai dasarnya.

Kemudian, melalui keterkaitannya dengan partisipasi, menurut temuan penelitian Campbell-Cree dan Lotten (2018) rasa percaya memunculkan kesediaan individu untuk bekerja sama secara sukarela. Oleh sebab itu, pengalaman sosial secara nyata pun memiliki keterhubungan dengan rasa percaya. Pada sisi yang lain, individu yang pernah berpartisipasi secara langsung dalam suatu kegiatan politik memiliki rasa percaya yang lebih tinggi terhadap pihak yang berwenang dibandingkan dengan individu yang belum pernah melibatkan diri sama sekali.

Selanjutnya, individu yang dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan atau memiliki interaksi yang komunikatif dengan pejabat politik dapat meningkatkan rasa percaya individu terhadap pemerintah, sebab adanya pengalaman politik secara nyata memberikan dasar informasi yang akan mengokohkan penilaian individu (Tanny & Al-Hossienie, 2019). Sehingga, hubungan diantara keduanya tidak hanya sebatas kepercayaan politik yang dapat meningkatkan partisipasi politik individu. Namun, pengalaman partisipasi individu pun

diketahui dapat memengaruhi persepsi dan tingkat kepercayaan individu.

Selain itu, bersikap mempercayai tidak selalu berarti bahwa seseorang menunjukkan kesetujuan dengan orang lain. Namun, bersikap mempercayai berarti individu saling sepakat untuk mewujudkan kepentingan nilai yang sama (Campbell-Cree & Lotten, 2018). Hal tersebut menegaskan bahwa keberadaan nilai dan kepercayaan secara bersama-sama memiliki peran tertentu terhadap partisipasi. Adanya kesamaan prioritas nilai di antara individu berhubungan erat dengan persepsi bahwa satu sama lain akan melakukan hal yang benar sesuai dengan komitmen kesepakatan. Sehingga, menunjukkan bahwa satu sama lain mengejar kepentingan nilai yang sama akan menjadi landasan yang menguatkan kepercayaan dalam hubungan interpersonal. Nilai juga menjadi suatu pendorong yang dapat memberikan variasi pada tingkat rasa percaya.

Kepercayaan dapat diperoleh melalui tindakan dari sejalannya prioritas nilai di antara individu. Apabila pemerintah dianggap mendukung dan menegakkan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat, hal tersebut dapat memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan berhubungan erat dengan keyakinan bahwa individu yang dipercaya menghargai prioritas nilai yang sama dengan individu yang mempercayai. Oleh sebab itu, nilai menjadi faktor terkuat yang dapat memberikan pengaruh pada kepercayaan individu (Campbell-Cree & Lotten, 2018).

Menurut Campbell-Cree dan Lotten (2018) kepercayaan yang didasari oleh nilai tertentu dapat membangun suatu ketertarikan dan minat dari individu untuk berpartisipasi. Rasa percaya terhadap institusi politik dapat menjadi indikasi bahwa terdapat kesesuaian antara kepentingan nilai individu dengan kepentingan nilai yang ditegakkan oleh pemerintah (Kołczyńska, 2020).

Telah diketahui bahwa kepercayaan politik memiliki hubungan yang searah dengan partisipasi politik. Sehingga, kepercayaan politik yang tinggi akan diikuti oleh tingkat partisipasi yang tinggi. Namun, berdasarkan temuan penelitian Matulesy dan Samsul (2013) dalam kondisi tertentu kepercayaan politik yang rendah pun dapat mendorong individu untuk berpartisipasi bila kepercayaan politik yang rendah dibersamai oleh kepentingan nilai tertentu. Bentuk partisipasinya pun hanya spesifik pada aktivitas protes atau demonstrasi. Hal ini disebabkan karena demonstrasi dianggap sebagai pilihan alternatif yang dapat memberikan tekanan sosial dan dapat mengekspresikan kekecewaan masyarakat atas ketidaksesuaian harapan terhadap pemerintah. Individu yang memiliki kepercayaan politik yang rendah belum tentu akan selalu mengikuti aksi demonstrasi bila dirasa tidak ada kepentingan nilai yang dapat dicapai melalui partisipasi tersebut. Sehingga, peran nilai dan kepercayaan secara bersama dapat melengkapi satu sama lain dalam menggerakkan individu untuk berpartisipasi, sebab nilai dapat menguatkan rasa percaya dan kepercayaan politik yang dibersamai dengan nilai personal dapat membangun ketertarikan dan minat pemuda untuk berpartisipasi.

Menurut Levi dan Stoker (2000) ketidakpercayaan mendorong tingkat partisipasi yang tinggi hanya pada situasi dan individu tertentu, khususnya pada individu yang memiliki ketertarikan politik, merasa tidak puas dengan pemerintah dan memiliki rasa efikasi politik yang tinggi, individu dengan tingkat pendidikan tinggi, atau individu dengan pengalaman politik yang merugikan. Selain itu, dapat diketahui bahwa ketiga variabel partisipasi, nilai, dan kepercayaan, sama-sama dipengaruhi oleh faktor sosio-demografis (Schwartz, 2006; Alelaimat, 2019; Tanny & Al-Hossienie, 2019).

Pada dasarnya topik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Tahun 2045 disebut sebagai periode kebangkitan kedua sebab bertepatan dengan genapnya 100 tahun Indonesia merdeka. Momentum tersebut disebut sebagai latar belakang dari kebangkitan generasi emas (Darman, 2017). Sebagaimana, menurut BPS (2013) bahwa Indonesia terus mengalami pertumbuhan penduduk hingga mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2035 kelak, maka selama dekade menuju kebangkitan kedua tersebut menjadi masa yang penting dalam mempersiapkan kualitas kompetensi generasi emas. Selama dua dekade yang tersisa, para pemilih pemula dalam penelitian ini akan turut menjadi bagian dari generasi emas di tahun 2045.

Situasi politik global tengah menghadapi babak baru dalam periodisasi politik, generasi pemuda sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat dunia perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai perubahan secara berkelanjutan tanpa kehilangan identitas diri sebagai pemuda bangsa. Oleh karena itu, kuncinya terletak pada kepekaan sosial pemuda untuk dapat merespons perubahan dan situasi politik global dengan cepat.

Menurut Ali dkk (2020) negara yang tak berdaya dalam melakukan investasi terhadap upaya untuk mempertahankan wawasan kebangsaan akan mengalami ketertinggalan. Sehingga, diharapkan pemerintahan dapat menepis disparitas dan keterasingan pemuda dari dunia politik serta mampu memberikan sarana yang dapat mempersiapkan pemuda untuk menghadapi situasi politik global.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemuda untuk lebih meningkatkan kepekaan sosial dan kesadaran politik dalam mengambil peran sebagai bagian dari tatanan kehidupan sosial. Namun, interpretasi hasil penelitian

kurang memadai untuk digeneralisasikan kepada keseluruhan populasi dari penelitian ini sebab adanya penyebaran data yang tidak merata. Sehingga, penarikan representasi terhadap populasi tidak dapat dilakukan. Selain itu, rentang waktu penelitian yang dapat diefisienkan kurang sepadan dengan banyaknya informasi yang dapat diperoleh jika peneliti dapat mendedikasikan perhatian secara penuh. Kemudian, peneliti turut menganjurkan kepada penelitian selanjutnya untuk menggunakan model pengukuran yang memang sesuai dan dapat lebih memaksimalkan operasionalisasi pengukuran dari variabel penelitian.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara nilai personal dengan partisipasi politik pemilih pemula. Kemudian, ada hubungan antara kepercayaan politik dengan partisipasi politik pemilih pemula.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Bagi pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan penyediaan peluang bagi masyarakat untuk menempuh jalur independen/nonpartisan dalam mengajukan kandidat anggota dewan perwakilan rakyat atau presiden dan wakil presiden melalui wacana amandemen konstitusi ke-5 sebagai bentuk perbaikan dan koreksi atas pelaksanaan amandemen sebelumnya; serta mempertimbangkan pengubahan aturan ambang batas pencalonan presiden dalam pasal 6A ayat (2) UUD

1945 untuk membuka kesempatan bagi putra/putri bangsa nonpartisan yang ingin mengajukan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden dari jalur perseorangan.

- 2) Bagi masyarakat terkhusus responden pada penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bagian dari lembaga pengawasan masyarakat yang bebas politisasi dan intervensi politisi; serta pemuda disarankan untuk tidak membatasi keaktifan hanya di media sosial saja, tetapi diharapkan dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan pemilihan umum, kampanye dan sosialisasi politik, gerakan partisan partai politik, sukarelawan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), maupun forum diskusi politik.
- 3) Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan mengenai pengukuran variabel-variabel seperti orientasi politik, kesadaran politik, perilaku memilih (*voting behavior*), atau keterikatan politik (*political engagement*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, I. (2018). Understanding psychological motives towards politics: Developing psychological orientation scale towards politics (POSP-S) for Indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 9(4), 487–510. <https://doi.org/10.18196/jgp.9491>
- Akhrani, L. A., Imansari, F., & Faizah. (2018). Kepercayaan politik dan partisipasi politik pemilih pemula. *Mediapsi*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2018.04.01.1>

- Alelaimat, M. S. (2019). Factors affecting political participation (Jordanian universities students' voting: field study 2017-2018). *Review of Economics and Political Science*, belum dicetak. <https://doi.org/10.1108/reps-05-2019-0072>
- Ali, M., Sudaryono, Soeharto, Musa, A. M., Luknanto, D., Alfian, M. A., Amirrachman, A., & Rahmawati, Y. (2020). *Arah kompetensi generasi Indonesia menuju 2045* (Suyanto & D. Koesoema A. (eds.)). Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Indonesia 2019*. Badan Pusat Statistik.
- Burns, N., Schlozman, K. L., & Verba, S. (2001). *The private roots of public action: Gender, equality, and political participation*. Harvard University Press.
- Cammaerts, B., Bruter, M., Banaji, S., Harrison, S., & Anstead, N. (2016). *Youth participation in democratic life: Stories of hope and disillusion*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137540218>
- Campbell-Cree, A., & Lotten, M. (2018). *The value of trust: How trust is earned and why it matters* (A. MacDonald (ed.)). British Council.
- Caprara, G. V., Schwartz, S., Capanna, C., Vecchione, M., & Barbaranelli, C. (2006). Personality and politics: Values, traits, and political choice. *Political Psychology*, 27(1), 1–28. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2006.00447.x>
- Caprara, G. V., Vecchione, M., & Schwartz, S. H. (2012). Why people do not vote: The role of personal values. *European Psychologist*, 17(4), 266–298. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000099>
- Catterberg, G., & Moreno, A. (2005). The individual bases of political trust: Trends in new and established democracies. *International Journal of Public Opinion Research*, 18(1), 31–48. <https://doi.org/10.1093/ijpor/edho81>
- Cheung, C. (2011). Political trust and social cohesion orientation in Hong Kong. In B. R. Curtis (Ed.), *Psychology of trust: Psychology of emotions, motivations, and actions* (pp. 27–52). Nova Science Publisher Inc.
- Darman, R. A. (2017). Mempersiapkan generasi emas Indonesia Tahun 2045 melalui pendidikan berkualitas. *Jurnal Edik Informatika: Penelitian Bidang Komputer Sains dan Pendidikan Informatika*, 3(2), 78–87. <https://doi.org/10.22202/jei.2017.v3i2.1320>
- Feldman, S. (2013). Political ideology. In L. Huddy, D. O. Sears, & J. S. Levy (Eds.), *The Oxford handbook of political psychology* (Second, pp. 591–626). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199760107.001.0001>
- Fitriah, E. A. (2014). Personal values dan internal political efficacy terhadap partisipasi politik mahasiswa pemilih pemula. *Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(2), 244–254.
- Grimmelikhuijsen, S., & Knies, E. (2017). Validating a scale for citizen trust in government organizations. *International Review of Administrative Sciences*, 83(3), 583–601. <https://doi.org/10.1177/0020852315585950>
- Hakim, M. A., & Soetjipto, H. P. (2014). Nilai dan afiliasi partai politik. *Wacana Jurnal Psikologi*, 6(11), 35–54.
- Handaningrum, R., & Rini, R. A. P. (2014). Persepsi terhadap kualitas calon legislatif (caleg), dan kepercayaan politik (political trust) dengan partisipasi politik. *Persona: Jurnal*

- Psikologi Indonesia*, 3(03), 223–236. <https://doi.org/10.30996/persona.v3i03.1578>
- Haryanto, H. C., Rahmania, T., Mubarok, A. R., Doyo, A. B., Fauzi, H., & Fajri, E. (2015). Bagaimanakah persepsi keterpercayaan masyarakat terhadap elit politik? *Jurnal Psikologi*, 42(3), 243–258. <https://doi.org/10.22146/jpsi.9913>
- Haste, H., & Hogan, A. (2006). Beyond conventional civic participation, beyond the moral-political divide: Young people and contemporary debates about citizenship. *Journal of Moral Education*, 35(4), 473–493. <https://doi.org/10.1080/03057240601012238>
- Kestilä-Kekkonen, E., & Söderlund, P. (2016). Political trust, individual-level characteristics and institutional performance: Evidence from Finland, 2004-2013. *Scandinavian Political Studies*, 39(2), 138–160. <https://doi.org/10.1111/1467-9477.12052>
- Kończyńska, M. (2020). Democratic values, education, and political trust. *International Journal of Comparative Sociology*, 61(1), 3–26. <https://doi.org/10.1177/0020715220909881>
- Kuncoro, M. W. (2018). Media sosial, trust, dan partisipasi politik pada pemilihan pemula. *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula: Penguatan keluarga di zaman now*, 161–168.
- Levi, M., & Stoker, L. (2000). Political trust and trustworthiness. *Annual Review Political Science*, 3, 475–507.
- Matulesy, A., & Samsul. (2013). Political efficacy, political trust, dan collective self-esteem dengan partisipasi dalam gerakan mahasiswa. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 04(01), 84–106.
- Mensana, F., & Sanjaya, E. L. (2020). Kepercayaan politik dan intensi memilih: Perilaku politik pemilihan remaja akhir di Surabaya menjelang pemilu 2019. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 23–38. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.7817>
- Nugroho, S., Akbar, S., & Vusvitasari, R. (2008). Kajian hubungan koefisien korelasi pearson (r), spearman-rho (ρ), kendall-tau (τ), gamma (G), dan somers (dyx). *Jurnal Gradien*, 4(2), 372–381.
- Pacheco, G., & Owen, B. (2013). Moving through the political participation hierarchy: A focus on personal values (2013/02). <http://hdl.handle.net/10419/242516>
- Ramadhanil, F., Junaidi, V., & Ibrohim. (2015). *Desain partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu* (S. Pramono & R. Widyastuti (eds.)). Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah di Indonesia.
- Riduwan, & Akdon. (2020). *Rumus dan data dalam analisis statistika* (Z. Arifin (ed.)). Alfabeta.
- Saad, S., & Salman, A. (2013). The role of values and attitudes in political participation. *Asian Social Science*, 9(8), 9–16. <https://doi.org/10.5539/ass.v9n8p9>
- Schwartz, S. H. (2006). Basic human values: Theory, measurement, and applications. *Revue Francaise de Sociologie*, 47(4). <https://doi.org/10.3917/rfs.474.0929>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian* (Ayup (ed.)). Literasi Media Publishing.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Tanny, T. F., & Al-Hossienie, C. A. (2019). Trust in government: Factors affecting public trust and distrust. *Jahangirnagar Journal of Administrative Studies, Department of Public Administration*, 2019(12), 49–63.

Uslaner, E. M. (Ed.). (2018). *The Oxford handbook of social and political trust*. Oxford University Press.

Wahyudi, H., Fernando, T., Ahmad, A., Khairani, A., Fatimah, Agung, I. M., & Milla, M. N. (2013). Peran kepercayaan

politik dan kepuasan demokrasi terhadap partisipasi politik mahasiswa. *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 9(2), 94–99.